

Peran Partai Keadilan Sejahtera dalam Pembangunan Politik terhadap Masyarakat Kota Medan di Era 5.0

Siti Novi Astri Syahputri¹, Mi'raj Dini Oktika², Irma Yusriani Simamora³, Surya⁴,
Teddy Ardiansyah Rambe⁵

^{1,2,3,4,5} Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: sitnov2911@gmail.com¹, dini141001@gmail.com²,
irmayusriyani75@gmail.com³, suryapro1208@gmail.com⁴,
tardiansyah277@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Partai Pks Dalam Pembangunan Politik Terhadap Masyarakat Kota Medan Di Era 5.0. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data primer bersumber dari Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kota Medan. Data skunder diperoleh dari buku-buku, literature maupun data-data lainnya. Sedangkan data berasal dari hasil penelitian, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lain yang sifatnya karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan Teknik analisis data deskriptif pada penelitian kualitatif adalah berupa proses menganalisis, menggambarkan dan meringkas kejadian atau fenomena dari data yang diperoleh melalui proses wawancara maupun pengamatan langsung ke lapangan. Hasil yang didapat ialah PKS sebagai perubahan kota Medan di era 5.0 adalah berperan positif terhadap pembentukan kehidupan masyarakat dalam pembentukan moral, akhlak dan etika.

Kata Kunci: *PKS, Pembangunan Politik, Era 5.0.*

Abstract

This study aims to determine the role of the PKS party in the political development of the people of Medan City in the 5.0 era. The type of research used is field research with a qualitative approach. Primary data comes from the Chair of the Prosperous Justice Party (PKS) in Medan. Secondary data obtained from books, literature and other data. While the data comes from research results, articles on the internet and other materials that are scientific in nature related to the problems to be discussed in this study. Data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. While descriptive data analysis techniques in qualitative research are in the form of analyzing, describing and summarizing events or phenomena from data obtained through interviews or direct field observations. The results obtained are that PKS as a change in the city of Medan in the 5.0 era is playing a positive role in the formation of people's lives in the formation of morals, morals and ethics.

Keywords: *PKS, Political Development, Era 5.0.*

PENDAHULUAN

PKS merupakan salah satu partai berbasis Islam, namun berada di bawah pemerintahan naungan Republik Indonesia. (Yuniartin, 2018: 261) PKS merupakan

kelompok fundamentalis yang tumbuh subur di kalangan kelas menengah perkotaan, namun berbeda dengan kelompok Islam modernis lainnya seperti Muhammadiyah, Persis, dll.

Selama ini Partai Keadilan Sejahtera telah membina kader-kader yang mampu membawa perubahan, dan di beberapa daerah Partai Keadilan Sejahtera juga berhasil mencetak pemimpin-pemimpin rakyatnya sendiri di tingkat daerah. (Muchtar & Aliyudin, 2019: 70)

Pembangunan adalah istilah yang digunakan dalam konteks yang berbeda dan sering digunakan dalam konteks politik dan ideologis tertentu. Ada banyak kata yang memiliki arti yang sama dengan kata pembangunan, seperti perubahan sosial, pertumbuhan, kemajuan, dan modernisasi.

Dari kata-kata tersebut, hanya perubahan sosial yang memberi arti pada perubahan ke arah yang lebih positif. Oleh karena itu, makna pembangunan tergantung pada konteksnya, siapa yang menggunakannya dan untuk tujuan apa. (Rosana, 2012: 141)

Perkembangan teknologi akibat pengaruh globalisasi memberikan dampak yang cukup kompleks bagi masyarakat Era Society 5.0 atau Society 5.0, yang merepresentasikan konsep kerjasama antara manusia dan teknologi untuk memecahkan masalah sosial yang terintegrasi dalam ruang dunia maya dan dunia nyata. Namun perkembangan teknologi dan globalisasi juga membawa dampak negatif bagi masyarakat, jika kemajuan dan perkembangan globalisasi tidak hanya berdampak positif bagi ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga berdampak negatif bagi moral setiap individu.

Kehidupan sosial masyarakat salah satunya di Kota Medan menjadi salah satu fenomena yang perlu diperhatikan, dalam hal ini penting bagi setiap elemen-elemen masyarakat untuk saling peduli dan pandai menyikapi perubahan sosial yang terjadi. (Sutyoso & Prihantika, 2021: 1-2)

Masyarakat diharapkan ikut serta dalam memajukan pembangunan Indonesia karena pemerintah berencana melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. (Martadinata, 2019: 2)

Peranan penting dari adanya partai politik di era 5.0 yakni memperjuangkan nilai menyerap aspirasi masyarakat yang dituangkan menjadi pembangunan politik dari kekuasaan yang dimiliki baik dalam tataran eksekutif maupun legislatif.

PKS menjadi partai politik yang lahir setelah reformasi berlangsung untuk mampu memmanifestasikan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia yang pada akhirnya mampu mengintegrasikan diri menjadi partai yang digandrungi masyarakat dikarenakan bukan hanya mengurus momentum politik saja, melainkan kebutuhan masyarakat dari primer hingga tersier pun diikhtiarkan sebagai proses investasi politik untuk kepentingan yang bersifat politis.

Hal ini menjadi sebuah paradigma politik kebangsaan yang menjadi dasar pembangunan politik berbasis substansi politik Islam yang menjadi haluan politik PKS sebagai partai politik yang memiliki gerakan trans-nasional untuk membangun entitas yang sama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai keislamannya.

Dengan hal yang menarik itulah menjadi dasar peneliti untuk terjun lebih dalam lagi melihat fenomena sosial politik yang terjadi dalam diri PKS di tengah masyarakat era 5.0 di kota Medan. Untuk itu judul dalam penelitian ini ialah Peran Partai Pks Dalam Pembangunan Politik Terhadap Masyarakat Kota Medan Di Era 5.0.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dimana pendekatan kualitatif ialah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. (Anggito & Setiawan, 2018: 8)

Data primer bersumber dari Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kota Medan. Data skunder diperoleh dari buku-buku, literature maupun data-data lainnya. Sedangkan data berasal dari hasil penelitian, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lain yang sifatnya karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan Teknik analisis data deskriptif pada penelitian kualitatif adalah berupa proses menganalisis, menggambarkan dan meringkas kejadian atau fenomena dari data yang diperoleh melalui proses wawancara maupun pengamatan langsung ke lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara demokrasi yang biasanya bernaung atau terdiri dari beberapa partai atau sistem multi partai. Dengan demikian, negara demokrasi memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk berpartisipasi aktif dalam partai politik untuk berpartisipasi dalam perubahan dan pergerakan negara sesuai dengan cita-cita nasionalnya.

Peranan partai politik dalam negara demokrasi berkembang sesuai dengan kepentingan partai-partai yang ada untuk mengikuti kepentingan seluruh rakyat, hanya saja partai politik yang berperan sebagai kelompok kepentingan yang memperjuangkan keinginan rakyat dibatasi hak-haknya dan akuntabilitas sebagai partai politik yang sah dalam negara demokrasi yang diatur dengan baik oleh partai politik dan pemilihan umum (Pemilu).

Karena melalui partai politik, rakyat mendapatkan jembatan aspirasi melalui lembaga perwakilannya, yang bermanfaat bagi suara seluruh rakyat. Dengan demikian, peran partai politik dalam negara demokrasi merupakan jembatan untuk menyampaikan keinginan seluruh rakyat, yang membawa perubahan sosial dan politik yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peran partai politik tidak hanya sebagai organisasi politik, tetapi juga sebagai organisasi yang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat melalui pendidikan politik yang teratur dan sistematis. (AW, 2015: 217-218)

Pelaksanaan pembangunan merupakan suatu langkah sukses dari pemilihan umum (pemilu) yang berhasil diikuti oleh beberapa partai politik yang merupakan agenda nasional bangsa Indonesia melalui pesta demokrasi yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Perubahan politik apa setelah pemilu mempengaruhi kelangsungan kehidupan demokrasi bangsa dan negara Indonesia di tingkat nasional dan lokal.

Dalam konteks pembangunan politik, pendidikan nasional khususnya pada subsektor pendidikan tinggi mau tidak mau harus dijadikan sebagai alat strategis reformasi kepala negara, karena disitulah kemajuan bangsa dipikirkan dan diharapkan negaranya timbul.

Pembangunan politik bukan hanya perubahan politik, tetapi pembangunan kesadaran politik masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan. Artinya, jika pendidikan nasional juga memenuhi tugas pembangunan politik, ia juga harus memajukan semua orang, meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab politik mereka, meningkatkan kesejahteraan mereka dan, tentu saja, melengkapi proyeksi mereka sebagai manusia seutuhnya.

Pendidikan nasional dipraktikkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kecerdasan yang relevan adalah kecerdasan untuk kemajuan umat manusia, bukan kecerdasan untuk mengurus pembangunan, bukan kecerdasan untuk menipu orang lain.

Partai politik adalah lembaga yang harus mengagregasi, mengartikulasi kepentingan yang terjadi dalam masyarakat, termasuk mensosialisasikan nilai-nilai politik yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Hal tersebut sejalan dengan fungsi dari partai politik yaitu:

1. Sosialisasi politik; adalah fungsi sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada.
2. Partisipasi politik; adalah fungsi yang dimiliki partai politik untuk mendorong masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan politik.
3. Komunikasi politik; adalah fungsi menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.
4. Artikulasi Kepentingan; adalah fungsi menyatakan atau menyampaikan (mengartikulasi)kepentingan konstituen (masyarakat) kepada badan-badan politik dan

pemerintah melalui melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang lain yang memiliki kepentingan yang sama.

5. Agregasi kepentingan; adalah fungsi partai politik yang memadukan semua aspirasi yang ada dalam masyarakat yang kemudian dirumuskan sebagai program politik dan diusulkan kepada badan legislatif dan calon-calon yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintahan mengadakan tawar-menawar dengan kelompok-kelompok kepentingan, dengan menawarkan pemenuhan kepentingan mereka kalau kelompok kepentingan itu mau mendukung calon tersebut.
6. Pembuatan kebijakan; adalah fungsi yang dimiliki oleh partai politik setelah partai politik meraih dan mempertahankan kembali kekuasaan didalam pemerintahan secara konstitusional. (Rosana, 2012: 144-145)

Urgensi dari pembangunan politik yang ditinjau dari kebijakan yang dikeluarkan sebagai manifestasi menampung aspirasi masyarakat guna memberikan rasa kepercayaan kepada partai politik sebagai penyambung lidah rakyat di birokrasi.

Komunikasi politik pun diperlukan bagi partai politik kepada masyarakat, partai politik lain, dan lembaga masyarakat lainnya untuk menyinergikan stabilitas politik yang dibangun demi kesinambungan pembangunan kota Medan di era 5.0. Pendidikan politik pun sebagai dasar bagi partai politik untuk menunjang kesadaran politik masyarakat secara komprehensif.

Konteks pembangunan politik biasanya terfokus pada negara-negara berkembang, dengan asumsi bahwa rasionalisasi, integrasi dan demokratisasi belum dilaksanakan di negara-negara tersebut. Pembangunan politik dalam arti fungsional diartikan sebagai gerak perubahan menuju sistem politik ideal yang ingin dikembangkan oleh suatu negara, misalnya Indonesia ingin mengembangkan sistem politik demokrasi konstitusional atau lebih bersifat prosedural. (Umar, 2020: 8258)

Jika dilihat dari kondisi masyarakat saat ini, masih ada masyarakat yang apatis, ada juga yang kritiknya luar biasa. Tetapi ada juga masyarakat yang tidak mau tahu tentang perkembangan kota Medan (hanya sekedar mendapat bantuan saja, seperti bantuan BLT, dan lain-lain).

Di era 5.0 saat ini, masih banyak masyarakat kota Medan yang acuh tak acuh terhadap perkembangan kota Medan, dikarenakan terbentur dengan perekonomian mereka sendiri, seolah-olah memisahkan kebijakan politik dengan faktor ekonomi yang mereka hadapi, padahal jika kebijakan politik bagus maka perekonomian juga bagus, begitupun sebaliknya jika kebijakan yang diambil pemerintah salah maka akan berefek ke masyarakat.

Peran PKS bagi pembangunan politik yakni sebagai pembawa perubahan bagi masyarakat. PKS sebagai agen perubahan di Kota Medan era 5.0 adalah berperan positif terhadap pembentukan kehidupan masyarakat dalam pembentukan moral, akhlak dan etika.

Nilai moral yang harus dimiliki menjadi aspek yang penting untuk dipahami, karena dalam hal ini PKS harus mampu beradaptasi dengan nilai dan moral yang ada pada lingkungan masyarakat sosial, agar mereka dapat diterima dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat.

PKS sebagai salah satu sarana pendidikan politik yang dapat mengadakan perubahan atau pembangunan politik. Objek perubahan atau unsur politik yang biasanya diobservasi ialah sistem nilai politik, struktur kekuasaan, strategi penanganan permasalahan kebijakan umum dan lingkungan masyarakat (kondisi-kondisi sosial-budaya, ekonomi, dan teknologi) dan fisik (sumber alam) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem politik.

Untuk itu partai politik salah satunya PKS diharapkan dapat memberikan perubahan yang berarti bagi negara yaitu perubahan yang bersifat positif. Dengan adanya partai politik salah satunya PKS, maka negara yang demokratis yang selama ini diharapkan dapat terwujud.

SIMPULAN

Konteks pembangunan politik cenderung ditujukan pada negara-negara sedang berkembang dengan asumsi bahwa dinegara-negara tersebut belum berjalan rasionalisasi,

integrasi dan demokratisasi. Peran PKS bagi pembangunan politik yakni sebagai pembawa perubahan bagi masyarakat. PKS sebagai sebagai agen perubahan di Kota Medan era 5.0 adalah berperan positif terhadap pembentukan kehidupan masyarakat dalam pembentukan moral, akhlak dan etika. Partai politik salah satunya PKS diharapkan dapat memberikan perubahan yang berarti bagi negara yaitu perubahan yang bersifat positif.

DAFTAR PUSTAKA

- AW, M. J. (2015). Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik UNTIRTA*, 6(2), 208-219.
- Martadinata, A. M. (2019). Peran Mahasiswa Dalam Pembangunan Di Indonesia. *IDEA: Jurnal Humaniora*, 2(1), 1-6.
- Muchtar, K., & Aliyudin. (2019). Public Relations Politik Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilu Jawa Barat. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 69-90.
- Sutiyoso, B. U., & Prihantika, I. (2021). *Peran Mahasiswa dalam Pembangunan Politik di Era Society 5.0 dan Revolusi Industri 4.0*. Lampung: LPPM UNILA.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher).
- Rosana, E. (2012). Partai Politik Dan Pembangunan Politik. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 8(1), 135-150.
- Umar, H. (2020). Pembangunan Politik Dan Teoritis. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 41(70), 8257-8274.
- Yuniartin, T. (2018). Identitas Politik Partai Keadilan Sejahtera. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 12(2), 257-274.